

# “Membangun Komitmen Daerah untuk Meningkatkan Motivasi Provider”

ditujukan kepada Walikota/Bupati  
seluruh Indonesia



*prepared by*

**Pusat Humaniora**

**PHK2PM Surabaya**

# PENDAHULUAN

- Latar Belakang
  - AKI & AKB tinggi
  - Jampersal → strategi pembiayaan
  - Implementasi msh banyak kendala
  - Studi PMPK UGM, Badan Litbang
- Isu Kebijakan
  - “provider kurang termotivasi dalam memberikan pelayanan dengan Jampersal”



*prepared by*

**Pusat Humaniora**  
**PHK2PM Surabaya**

- Tujuan → rekomendasi 'pilihan kebijakan' terkait komitmen daerah untuk meningkatkan motivasi provider
- Pendekatan → legal aspek legal
- Ruang Lingkup & Keterbatasan
  - dikhususkan pada provider pelayanan dasar kesehatan ibu & anak dalam Jampersal.
  - pelayanan dasar adalah bidan praktek swasta serta Puskesmas dan jaringannya.



*prepared by*

**Pusat Humaniora**  
**PHK2PM Surabaya**

- Lokasi Studi (7 propinsi / 14 kabupaten/kota)
  - Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku
  - Kab. Sampang, Kota Blitar, Kota Bandung, Kab. Bogor, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kota Kendari, Kab. Wakatobi, Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kota Ambon, Kab. Kepulauan Aru



*prepared by*

**Pusat Humaniora**  
**PHK2PM Surabaya**

# PERKEMBANGAN

- Perubahan Juknis → 2011 ke 2012
  - Kenaikan jasa pelayanan
- Tidak Ada Kebijakan Lokal
  - Tidak ada turunan kebijakan di tingkat lokal
  - Bogor, Balikpapan, Paser, Wakatobi, Kepulauan Aru, Mataram (akhir 2012 jadi Perwali)



*prepared by*

**Pusat Humaniora**

**PHK2PM Surabaya**

# PERKEMBANGAN (2)

- Kebijakan Lokal Tidak Mendukung
  - Jasa pelayanan terlalu rendah → Ambon
  - Persyaratan sulit (SIP IBI) → Ambon
  - Tidak ada jasa pelayanan → Batam
  - Berbagi dengan dukun → Lombok Tengah



*prepared by*

**Pusat Humaniora**

**PHK2PM Surabaya**

# IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Tidak adanya turunan kebijakan → berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antar aktor pelaksana lapangan
- Jasa pelayanan yang diterima tidak sama dengan besaran jasa pelayanan yang diatur Juknis
- Pencairan lambat
- Motivasi bidan kurang → gampang merujuk



*prepared by*

**Pusat Humaniora**  
**PHK2PM Surabaya**

# PILIHAN KEBIJAKAN

- Pilihan 1
  - Membuat Perda
  - Lebih kuat , tapi proses lama
- Pilihan 2
  - Membuat Perbup/ Perwali
  - Cepat



*prepared by*

**Pusat Humaniora**

**PHK2PM Surabaya**

# Rekomendasi

Pilihan kebijakan yang paling memungkinkan untuk dengan cepat merespon dan dengan segera dapat diimplementasikan

## Perwali/Perbup



*prepared by*

**Pusat Humaniora**

**PHK2PM Surabaya**

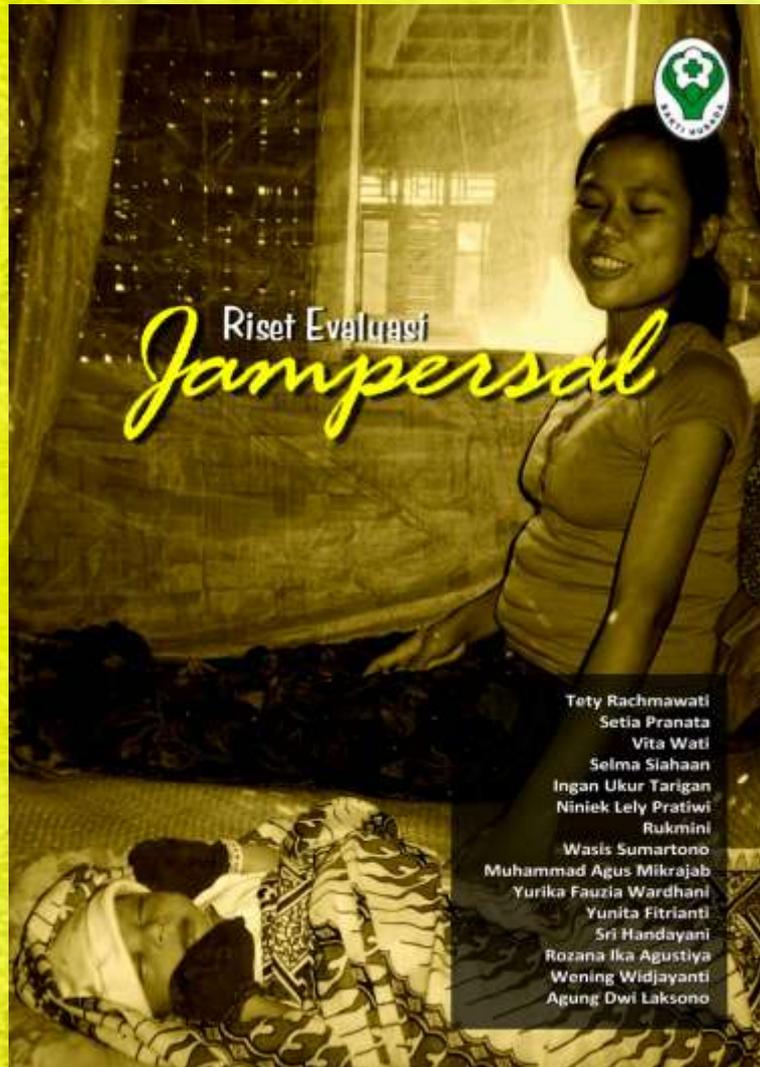
# Rekomendasi (2)

- Menetapkan jasa pelayanan sesuai dengan Juknis, yaitu minimal 75% dari tarif pelayanan.
- Tidak memberikan syarat tambahan untuk mendapatkan pelayanan Jampersal.
- Menetapkan syarat bagi bidan yang ingin melakukan PKS sesuai dengan Juknis,
- dengan tetap memperhatikan sumber daya tersedia. Bila bidan yang tersedia 100% adalah lulusan P2B (D1), maka menjadi tidak cocok bila syarat yang ditetapkan hanya untuk bidan lulusan akademi (D3).



*prepared by*

**Pusat Humaniora**  
**PHK2PM Surabaya**



Untuk keterangan lebih detail bisa dibaca pada buku “***Riset Evaluasi Jampersal***”.

Buku bisa didownload pada tautan berikut;

<http://www.scribd.com/doc/120760873/Riset-Evaluasi-Jampersal>



prepared by

**Pusat Humaniora**  
**PHK2PM Surabaya**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



*prepared by*

**Pusat Humaniora**

**PHK2PM Surabaya**